Eksekusi:Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Volume. 2, No. 3 Agustus 2024





e-ISSN: 2987-7113;, p-ISSN: 2987-9124;, Hal. 42-55 DOI: https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1177

Partisipasi Masyarakat Dalam Program Terobosan Baru Kampung Madani Sebagai Upaya Mengurangi Angka Kemiskinan di Kota Surabaya

Lutfia Diva Rahmawati

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: lutfiaadivarr@gmail.com

Djoko Widodo

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstract. Poverty in Indonesia persists to this day, and it is the government's responsibility to at least reduce the poverty rate. Surabaya, as the second largest city after Jakarta with a population of 2,887,223 people, is poised to experience growth in the coming years. High levels of urbanization bring new challenges to Surabaya, such as urban-rural disparities with the existence of slum areas. The aim of this research is to deeply analyze the level of community involvement and contribution in implementing the New Breakthrough Program of Kampung Madani in Surabaya, as well as to identify the social, economic, cultural, and political factors that influence the level of community participation in the program. This research employs a qualitative approach, particularly in the form of descriptive research. The descriptive analysis aims to provide a clear, objective, systematic, analytical, and critical overview of community participation in the New Breakthrough Program of Kampung Madani as an effort to reduce poverty in Surabaya. The theory of community participation according to Yadaf (2012) is used in this research. The results of the research show that community participation in the New Breakthrough Program of Kampung Madani is quite significant, as evidenced by the enthusiasm of village officials and philanthropic individuals who willingly and sincerely help those in need.

Keywords: Poverty, Kampung Madani, LAZ, BAZNAS, Muzakki

Abstrak. Kemiskinan di Indonesia berlangsung terus-menerus hingga saat ini, dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk setidaknya mengurangi angka kemiskinan. Kota Surabaya, menjadi kota terbesar nomer dua setelah Kota Jakarta dengan jumlah penduduk mencapai 2.887.223 jiwa, berpotensi mengalami peningkatan dalam beberapa tahun mendatang. Tingkat urbanisasi yang tinggi membawa masalah baru bagi Surabaya, seperti kesenjangan perkotaan dengan adanya pemukiman kumuh atau slum area. Tujuan penelitian ini adalah untuk secara mendalam menganalisis tingkat keterlibatan dan kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan Program Terobosan Baru Kampung Madani di Kota Surabaya, serta mengidentifikasi faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, khususnya dalam bentuk penelitian deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang objektif, jelas, sistematis, kritis, dan analitis tentang partisipasi masyarakat dalam Program Terobosan Baru Kampung Madani sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan di Kota Surabaya. Teori partisipasi masyarakat menurut Yadaf (2012) dikaji dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program Terobosan Baru Kampung Madani cukup signifikan, terlihat dari antusiasme perangkat desa dan masyarakat muzakki atau pemberi sedekah yang dengan sukarela dan ikhlas membantu sesama yang membutuhkan.

Kata kunci: Kemiskinan, Kampung Madani, LAZ, BAZNAS, Muzakki

PENDAHULUAN

Permasalahan yang selalu dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia salah satunya yaitu kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia terjadi secara terus-menerus hingga masa kini dan menjadi tugas pemerintah untuk benar-benar setidaknya meminimalisir angka

kemiskinan di Indonesia. Masalah kemiskinan jika tidak segera diatasi dapat menyebabkan seseorang akan terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Lingkaran kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan, tabungan, investasi, produktivitas, dan modal seseorang, serta rendahnya tingkat kualitas SDM yang tidak dibarengi dengan banyaknya jumlah SDM dan SDA yang dikelola dengan baik. Jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 281.603,8 juta jiwa dengan persentase penduduk miskin berdasarkan data perhitungan akhir Susenas Maret 2023 sebesar 7,29 persen (Badan Pusat Statistik Indonesia). Hal tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kualitas SDM yang akan berpengaruh pada keterbatasan dalam beraktivitas, keterampilan, dan pengetahuan, sehingga berdampak pada kurang maksimalnya pengelolaan SDA. SDA yang tidak dikelola dengan baik dengan SDM yang berkualitas akan menimbulkan banyak pengangguran karena tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi banyaknya pengangguran di Indonesia (Permata, 2023).

Kota Surabaya, menjadi kota terbesar nomer dua setelah Kota Jakarta dengan jumlah penduduk mencapai 2.887.223 jiwa, berpotensi mengalami peningkatan dalam beberapa tahun mendatang. Meskipun telah menjadi kota besar dan maju tidak menutup kemungkinan banyak terjadi permasalahan sosial yang berpengaruh pada kesejahteraan sosial masyarakat. Dilansir dari (suarasurabaya.net) permasalahan yang saat ini menjadi tugas bagi pemerintah Kota Surabaya yaitu pengangguran, kasus gizi buruk, *stunting*, rumah tidak layak huni, kemiskinan, urbanisasi, dan lain sebagainya. Surabaya juga menjadi kota tujuan bagi para perantau yang ingin mencari kesempatan baru untuk mencari nafkah dan meningkatkan taraf hidup mereka (Elanda & Alie, 2023). Tingkat urbanisasi yang tinggi menciptakan masalah baru bagi Kota Surabaya seperti munculnya kesenjangan di perkotaan dengan adanya pemukiman kumuh atau *slum area*.

Tabel 1. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Di Kota Surabaya 2019-2023

Tahun	Garis Kemiskinan / GK (rupiah/kapita sebulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
2019	567.474	130,55	4,51
2020	592.137	145,67	5,02
2021	611.466	152,49	5,23
2022	652.540	138,21	4,72
2023	718.370	136,37	4,65

Sumber: BPS Kota Surabaya

mengalami penurunan sekitar 1,84 ribu jiwa. Hal ini menunjukkan penurunan dari 138,21 ribu jiwa pada tahun 2022 menjadi 136,37 ribu jiwa pada tahun 2023, menandakan penurunan sekitar 1,33 persen. Persentase penduduk miskin di Surabaya pada tahun yang sama juga mengalami penurunan sekitar 0,07 persentase poin, dari 4,72 persen pada tahun 2022 menjadi 4,65 persen pada tahun 2023. Topik perilaku kemiskinan tidak terbatas pada jumlah dan sikap subjek kemiskinan. Titik penting lain yang perlu dipertimbangkan adalah tingkat ketimpangan dan derajat kemiskinan yang ada saat ini. Indeks Kesenjangan Kemiskinan (P1) adalah jumlah, secara rata-rata, yang diperoleh setiap orang miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Semakin tinggi angka indeksnya, semakin besar perbedaan antara pendapatan orang miskin dan tingkat kemiskinan.

Sepanjang tahun 2022-2023, Kota Surabaya mengalami kenaikan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 0,02 poin, dari 0,69 pada tahun 2022 menjadi 0,71 pada tahun 2023. Di sisi lain, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan dari 0,18 pada tahun 2022 menjadi 0,16 pada tahun 2023. Kenaikan nilai P1 pada tahun 2023 sebesar 0,02 poin diduga disebabkan oleh tingginya tingkat inflasi selama periode tersebut, yang tidak cukup mendorong penduduk yang sangat miskin untuk meningkatkan daya belinya. Oleh karena itu, program bantuan sosial kemiskinan selanjutnya diarahkan untuk membantu mereka yang berada dalam kategori sangat miskin. Salah satu pendekatan yang diusulkan adalah memberikan bantuan tunai secara langsung, sehingga penduduk yang sangat miskin dapat keluar dari kondisi kemiskinan (Badan Pusat Statistik Surabaya 2023). Memperhatikan kebijakan pembangunan, terutama yang bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, diharapkan juga akan menurunkan tingkat kesenjangan dan tingkat keparahan kemiskinan.

Menurut Kartasasmita dalam penelitian yang dilakukan oleh (Wirawan & Nurpratiwi, 2015) menjelaskan bahwa upaya dalam menanggulangi kemiskinan dapat diimplementasikan melalui tiga arah kebijakan yaitu (1) Kebijakan tidak langsung yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang mendukung kelangsungan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, (2) Kebijakan langsung yang secara khusus ditujukan untuk masyarakat golongan penghasilan minimum, (3) Kebijakan khusus yang bertujuan untuk menyiapkan masyarakat miskin dengan aparat yang bertanggung jawab, sekaligus penggerak terhadap keberlangsungan program. Sri Mulyani (Giani et al., 2023) menjelaskan bahwa suatu kebijakan yang dapat mengatasi kemiskinan yaitu kebijakan yang membuka peluang untuk partisipasi masyarakat dalam proses pertumbuhan itu sendiri dengan maksud kebijakan ini mengakui jika keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan sangatlah penting.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Rumak et al., n.d.) H. A. R. Tilaar menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan manifestasi dari keinginan untuk memperkuat demokrasi melalui desentralisasi dimana hal ini melibatkan perencanaan dari bawah atau bottom up yang melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan dan pembangunan di tingkat lokal. Partisipasi aktif masyarakat dalam program pemerintah merupakan faktor kunci untuk keberhasilan pembangunan. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan komitmen dalam mencapai tujuan program, tetapi juga memperkaya keterampilan dan pengetahuan masyarakat. Dalam konsep pembangunan terdapat lingkup partisipasi masyarakat menurut Yadaf yang terdiri dari 4 variabel yaitu, pertama partisipasi dalam pengambilan bentuk keputusan, kedua partisipasi dalam bentuk pelaksanaan kegiatan, ketiga partisipasi dalam bentuk pemantauan dan evaluasi, dan terakhir partisipasi dalam bentuk pemanfaatan hasil pembangunan.

Partisipasi masyarakat merupakan hal utama dalam pelaksanan perencanaan pembangunan, hal ini sesuai dengan pendapat Conyers dalam penelitian yang dilakukan oleh (Rizal Andreeyan, 2019)dimana ada tiga alasan utama mengapa dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat menjadi hal utama, yaitu sebagai berikut:

- 1. Masyarakat berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan informasi mengenai kebutuhan, kondisi, dan sikap masyarakat lokal.
- 2. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program pembangunan akan meningkat jika mereka terlibat dalam perencanaan dan persiapannya. Dengan terlibat, mereka akan lebih memahami detail-detail program tersebut dan merasa memiliki terhadapnya.
- 3. Menggalakkan partisipasi umum adalah penting karena hal ini akan memberi kesan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan adalah hak demokratis.

Dengan melibatkan partisipasi masyarakat di lingkup paling kecil memudahkan untuk mengidentifikasi dan mengetahui golongan masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Yulianto Kadji, 2020) umumnya suatu keadaan bisa dikatakan miskin apabila ditandai dengan seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusianya. Kemiskinan tersebut mencakup tidak terpenuhinya kebutuhan dasar primer dan sekunder. Kebutuhan primer seperti kekurangan aset pengetahuan dan keterampilan, sementara kebutuhan sekunder seperti sumber daya keuangan, kekurangan jaringan sosial, dan dukungan informal, seperti kekurangan gizi, perumahan yang layak, perawatan kesehatan yang terbatas, akses air bersih, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Sejalan dengan program terobosan baru yang dicanangkan oleh Walikota Surabaya Pak Eri Cahyadi yaitu Program Kampung Madani, dimana program ini merupakan kampung yang melaksanakan roda kehidupan masyarakatnya dengan menerapkan prinsip gotongroyong, keswadayaan, dan kemandirian ekonomi untuk mendukung pembangunan multikultural dengan landasan Pancasila sebagai prinsip utama. Lingkup kegiatan program ini terletak di kelurahan dengan dua kampung madani dan satu tempat ibadah di setiap RW. Tidak hanya masyarakatnya yang diberdayakan, karena semua lurah dan camat turut serta mendapatkan pelatihan oleh berbagai pihak demi kelancaran program ini. Program Kampung Madani disinyalir sebagai upaya yang dimulai dari lingkup paling kecil yaitu kelurahan untuk mengetahui bagaimana kondisi warganya secara menyeluruh. Berdasarkan kajian diatas, peneliti ingin meneliti tentang "Partisipasi Masyarakat dalam Program Terobosan Baru Kampung Madani Sebagai Upaya Mengurangi Angka Kemiskinan di Kota Surabaya".

KAJIAN TEORITIS

Berkaitan dengan kajian pustaka pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori yang relevan untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan yang ada di atas, teori tersebut yaitu:

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat umum dimaksudkan untuk mengatasi kekhawatiran semua warga dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui cara diam atau melalui organisasi yang mewakili kepentingan masyarakat umum. Hal ini terkait dengan pernyataan Mulyadi bahwa masyarakat umum seharusnya membantu peserta dalam proses pengembangan tujuan dan implementasi program agar masyarakat umum akan mendapatkan manfaat dari inisiatif tersebut. Selain itu, melalui evaluasi yang melibatkan masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka (Rumak et al., n.d.). Dalam program pembangunan terdapat empat proses partisipasi masyarakat, yaitu:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi pada tahap pengambilan keputusan ini membicarakan mengenai sesuatu yang berhubungan dengan penentuan ide alternatif menyangkut kepentingan masyarakat banyak, serta wujud nyata dari partisipasi ini berupa opini atau ide, kehadiran dalam rapat dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

Partisipasi dalam tahap kegiatan ini melibatkan peningkatan rata-rata pendapatan masyarakat, tabungan, atau bentuk pendapatan lain yang terkait dengan manfaat yang akan

diterima setiap individu. Saat mengatur partisipasi dalam proyek ini, penting untuk melibatkan masyarakat dalam mengevaluasi hasil proyek agar manfaat dapat dipertahankan tanpa mengorbankan kualitas dalam jangka panjang.

3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi

Partisipasi dalam tahap pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mendapatkan umpan balik atau wawasan tentang masalah atau permasalahan yang muncul selama proses pembangunan melalui partisipasi aktif masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi.

4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan

Partisipasi ini akan memotivasi keinginan dan kerelaan masyarakat untuk terus terlibat dalam setiap program pembangunan mendatang. Penggunaan hasil pembangunan sering kali diabaikan oleh pemerintah karena diasumsikan bahwa manfaatnya akan langsung dirasakan oleh masyarakat. Namun, masih terdapat masyarakat yang tidak memahami manfaat dari program pembangunan yang dilaksanakan sehingga hasil pembangunan yang dilaksanakan menjadi tidak bermanfaat.

Tingkat Partisipasi Masyarakat

Sherry Arnstein dalam penelitian yang dilakukan oleh (Muhyar Nugraha, 2018) membuat skema delapan tingkat partisipasi masyarakat yang sering dikenal dengan sebutan *A Ladder of Citizen Participation* atau tangga partisipasi, sebagai berikut:

Gambar 1. Tangga Partisipasi oleh Sherry Arnstein 8 Kendali Masyarakat (citizen control) Degree of Citizen Power (Derajat 7 Delegasi Kekuasaan (delegated power) Kekuasaan Masyarakat) 6 Kemitraan (partnership) 5 Degree of Tokenism (Derajat Peredaman (placation) Tanda Partisipasi) 4 Konsultasi (consultation) 3 Penginfromasian (informing) 2 Nonparticipation (Tidak Terapi (therapy) Manipulasi (manipulation) Partisipasi) Sumber: (Muhyar Nugraha, 2018)

a. Tingkat Kekuasaan Warga

Tingkat tertinggi adalah tingkat kuasa warga di mana masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan kebijakan. Ada tiga tingkatan yaitu mencakup kemitraan, yang menunjukkan hubungan timbal balik yang dinegosiasikan; delegasi kekuasaan, di mana

masyarakat diberi wewenang sebagian atau seluruhnya dalam kebijakan dan kendali warga, menunjukkan bahwa kebijakan sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat.

b. Tingkat Partisipasi

Tingkat partisipasi merupakan tingkat dalam memberikan informasi, konsultasi, dan penentraman, pada tingkatan ini menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan, meskipun pemerintah tetap memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan.

c. Tingkat Nonpartisipasi

Tingkat nonpartisipasi mencakup distorsi partisipasi di mana pemegang kekuasaan tidak benar-benar ingin melibatkan masyarakat, melainkan hanya menyenangkan mereka. Ini dibagi menjadi manipulasi, yang melibatkan permainan dari pemerintah, dan terapi, yang bertujuan untuk mencegah masyarakat dari protes atau keberatan terhadap kebijakan yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, khususnya dalam bentuk penelitian deskriptif. Tujuan dari analisis deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk menyajikan data yang jelas, objektif, analitis, sistematis, dan kritis mengenai partisipasi masyarakat dalam Program Kampung Madani Baru sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan di Surabaya. Kumpulan data primer dan sekunder merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer berasal dari dokumentasi dari salah satu kelurahan di Kota Surabaya, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui tinjauan pustaka yang mencakup berbagai jenis jurnal, buku, laporan program, artikel, dan data sekunder lain yang relevan dengan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan untuk mengurangi kemiskinan. Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Selain itu, teori partisipasi masyarakat menurut Yadaf (2012) digunakan sebagai landasan teoritis dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks pembangunan, partisipasi masyarakat adalah faktor krusial yang harus dipertimbangkan. Tujuan dari pembangunan masyarakat adalah untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, dan mengubah kondisi yang kurang diinginkan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi penting karena dapat menjadi penentu keberhasilan sebuah pembangunan. Menurut Histiraludin sebagaimana dikutip dalam (Riski Maunde, 2020), partisipasi lebih dari sekadar alat, sehingga didefinisikan sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh proses kegiatan. Hal ini juga dianggap sebagai sarana untuk membangun

kohesivitas antara anggota masyarakat, serta memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah, yang pada gilirannya memicu rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap program-program yang dilaksanakan.

Program Kampung Madani yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Surabaya merupakan sebuah inovasi dalam pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan pada makna kata "madani" yang berasal dari bahasa Arab, dimana mengacu pada konsep masyarakat sipil, beradab, dan beradat. Arti harfiah kata "madani" berkaitan erat dengan hak-hak sipil yang berakar pada norma dan nilai yang dianut oleh ilmu pengetahuan. Dengan konsep ini, Kampung Madani diinterpretasikan sebagai suatu kampung yang menekankan pada prinsip-prinsip gotong-royong, swadaya, dan mandiri ekonomi. Di dalamnya, peran zakat, infak, sedekah, dan wakaf dari warga dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan yang berbasis multikultural dengan mengacu pada nilai Pancasila sebagai landasan yang berlaku.

Program ini dijalankan dengan kolaborasi antara Pemerintah Kota Surabaya dengan berbagai stakeholder seperti UPD, perusahaan-perusahaan yang melakukan CSR, lembaga akademisi, Kementerian Agama, Baznas, BWI, LAZIS, Bank Jatim Syariah, Bank Syariah Indonesia, dan BPR SAU. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat mustahiq (fakir miskin/penerima zakat) agar dapat bertransformasi menjadi masyarakat yang muzakki yaitu orang yang memberi zakat. Program ini diluncurkan mengingat masih banyaknya jumlah pengangguran di Kota Surabaya dan balita dengan gizi buruk yang keluarganya berada dalam kategori keluarga miskin.

Gambar 2. Diagram Jumlah Pengangguran Kategori Jenis Kelamin
Tahun 2021-2023



Sumber : Dokumentasi BPS Kota Surabaya

Diagram diatas merupakan diagram Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya pada tahun 2021-2023 kategori jenis kelamin. TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap di pasar kerja. TPT pada Agustus 2022 sebesar 7,62 persen, kemudian menurun

menjadi 6,76 persen pada Agustus 2023. Pendorong utama penurunan ini adalah terjadinya penurunan TPT pada laki-laki dari 9,66 persen pada Agustus 2022 menjadi 7,30 persen pada Agustus 2023, sebaliknya TPT perempuan mengalami kenaikan dari 4,61 persen pada Agustus 2022 menjadi 6,04 persen pada Agustus 2023.

Berangkat dari salah satu contoh permasalahan diatas maka semakin mendorong semangat Bapak Eri Cahyadi untuk melaksanakan program ini. Dilansir dari radarsurabaya.jawapos.com Pak Eri mengatakan bahwa:

"Di Kota Surabaya, Kampung Madani memiliki empat kuadran sebagai pedoman yang menjadi landasan pelaksanaannya.

Pertama, ada kuadran di mana kampung atau RW mampu menggerakkan potensi gotong royong warganya untuk menangani berbagai permasalahan sosial-ekonomi, seperti stunting, gizi buruk, putus sekolah, pengangguran, dan masalah sosial lainnya.

Kuadran kedua adalah di mana kampung tersebut mampu menyelesaikan semua permasalahan yang ada di wilayahnya. Dengan kata lain, semua masalah berhasil diatasi dan mencapai angka nol di kampung tersebut.

Selanjutnya, kuadran ketiga adalah ketika semua permasalahan di kampung tersebut telah terselesaikan dengan baik, sehingga kampung atau RW tersebut mampu memberikan bantuan kepada kampung lain di dalam wilayah kelurahan yang sama.

Terakhir, kuadran keempat adalah di mana kampung mampu menyelesaikan permasalahan di dalam wilayahnya sendiri, di tingkat kelurahan, bahkan mampu memberikan bantuan kepada warga di kelurahan lainnya."

Dengan demikian, kuadran-kuadran ini memberikan arahan yang jelas bagi kampungkampung dalam program Kampung Madani untuk bergerak menuju kemandirian, solidaritas, dan kemajuan yang berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Surabaya.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Peran dan sikap masyarakat sebagai faktor utama keberhasilan program juga berpengaruh sebagai faktor penghalang apabila tidak adanya komitmen dalam menjalankan program tersebut. Dalam konteks ini proses pengambilan keputusan melibatkan diskusi tentang penentuan berbagai alternatif ide yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Dalam prakteknya, partisipasi ini tercermin dalam kontribusi ide-ide baru, kehadiran dalam rapat-rapat, serta memberikan tanggapan positif atau berupa penolakan terhadap program-program yang diajukan. Terkait dengan partisipasi masyarakat dalam

program Kampung Madani, masyarakat terlibat dalam forum diskusi yang diadakan oleh Pak Eri Cahyadi saat pertama kali program Kampung Madani diluncurkan pada Juni 2023 (*kumparan.com*). Dalam forum tersebut banyak wakil-wakil masyarakat yang datang dan turut serta berdiskusi untuk penyusunan prosedur dan cara kerja program ini.

Berdasarkan pengamatan penulis di salah satu kelurahan di Kota Surabaya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terlihat dari perangkat desa khususnya bagian Kesejahteraan Masyarakat yang melakukan pendataan terhadap banyaknya informasi yang masuk mengenai jumlah warga di kelurahan tersebut tergolong sebagai warga mustahik atau penerima zakat dari beberapa RT yang dibantu oleh KSHnya. Dengan ini melalui forum bersama yang diselenggarakan oleh lurah dan jajarannya bersama RT RW masyarakat dapat memberikan saran atau ide sebagai bentuk partisipasi pemikirannya terkait kondisi dan solusi yang harus diupayakan untuk mengatasi warga golongan mustahiq tersebut. Masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya namun pihak pengambil keputusan tetap berada pada tangan perangkat tinggi desa, karena pada lingkup kelurahan pengambilan keputusan sudah diserahkan kepada lurah yang bertanggung jawab mengenai kondisi kelurahannya.

Partisipasi dalam pengambilan keputusan pada program ini telah sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, terutama pada Pasal 1 yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah bentuk keterlibatan warga dalam menyampaikan aspirasi, pemikiran, dan kepentingan mereka dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Namun, perlu dilakukan lebih banyak sosialisasi atau forum pengambilan keputusan dengan masyarakat untuk memperkuat partisipasi tersebut. Dilihat sejauh program ini berjalan masih belum ada sosialisasi lebih lanjut mengenai bagaimana proses kerja Program Kampung Madani dan masih banyak masyarakat Kota Surabaya sendiri yang tidak mengetahui apa itu Kampung Madani. Hal ini menunjukkan jika program ini sasarannya hanya pada stakeholder yang terlibat dan masyarakat sasaran program ini yaitu masyarakat mustahik.

Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan

Tahap pelaksanaan ini adalah titik puncak dari suatu proses di mana akan dibangun sarana yang mengakomodasi kepentingan bersama. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk melibatkan langsung masyarakat wilayah kelurahan di Kota Surabaya dalam pelaksanaannya. Hal ini akan memperkuat rasa kebersamaan, semangat gotong royong, dan memberikan bantuan kepada masyarakat di desa itu sendiri. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, menurut Yadaf melibatkan masyarakat secara sukarela dengan menyumbangkan tenaga kerja, uang tunai, ide-ide, dan bentuk korban lainnya, sejalan dengan

manfaat yang akan diterima oleh setiap individu yang terlibat. Sejalan dengan program ini, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dilihat dari kesukarelaannya menyumbangkan sedikit uang mereka untuk membantu warga yang kesulitan.

Hal ini bukan hanya sebagai tuntutan dari Pak Eri yang mengajak warganya untuk menggalakkan zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) secara produktif, melainkan ini sebagai bentuk partisipasi mereka yang merupakan warga mampu dalam hal ekonomi untuk membantu sesamanya yang kesulitan. Uang yang terkumpul akan dihimpun oleh Kemenag Surabaya, Baznas Surabaya, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang kemudian akan disalurkan kepada warga miskin sesuai data yang telah didapatkan oleh per kelurahan di Surabaya dalam bentuk modal usaha seperti alat dagang atau gerobak usaha. Harapannya, melalui zakat produktif ini kurang lebih dalam waktu lima bulan warga yang memperoleh zakat telah memiliki tabungan dan bisa mandiri secara ekonomi dan mengurangi sedikit jumlah pengangguran di Surabaya.

Penelitian yang dilakukan oleh (AIFIN) mengartikan jika Konsep zakat produktif mengacu pada pengelolaan zakat secara produktif dengan mengalirkan modal usaha kepada mustahiq sebagai penerima zakat, yang kemudian akan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Sementara itu, konsep zakat konsumtif merujuk pada pendistribusian zakat dalam bentuk uang tunai, baik dalam bentuk santunan untuk memenuhi kebutuhan pokok penerima maupun untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Bentuk partisipasi lain yang bisa dibuktikan yaitu partisipasi masyarakat dengan kesukarelaan menyumbangkan tenaganya untuk membantu dalam proses penyaluran dana zakat kepada warga dengan kelainan fisik di salah satu kelurahan di Surabaya. Hal ini menunjukan jika program ini benar-benar memperhatikan bagaimana kondisi semua warganya agar tidak terjadi ketimpangan sosial di wilayah kelurahan tersebut, dengan turut serta melibatkan masyarakat muzakki atau pemberi zakat.

Gambar 3. Penyaluran Dana Zakat kepada Warga dengan Kelainan Fisik



Sumber: Dokumentasi Media Sosial Kelurahan Kebraon

Partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan dan Evaluasi

Partisipasi dalam memantau dan mengevaluasi proyek konstruksi, khususnya dalam program pemerintah berbasis pembangunan masyarakat, biasanya dilakukan melalui protokol pemantauan dan evaluasi partisipatif atau MONEV. Pada fase ini, partisipasi publik sangat dihargai, bukan hanya sebagai sarana untuk merealisasikan manfaat konstruksi, tetapi juga sebagai bagian dari proses konstruksi itu sendiri. Yadaf menjelaskan bahwa partisipasi publik dalam proses penilaian dan pemantauan ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan informasi tentang perkembangan aktivitas harian dan mesin konstruksi. Oleh karena itu, masyarakat perlu melatih pemikiran kritis untuk memahami informasi ini. Partisipasi dan evaluasi masyarakat dalam inisiatif ini hampir sepenuhnya sejalan dengan teori Yadaf.

Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari walikota Surabaya yang telah berkoordinasi dengan lurah-lurah di kelurahan Surabaya untuk terus melakukan monitoring terhadap perkembangan modal yang telah diberikan, apakah alat dagang yang diberikan benar dipergunakan untuk memenuhi dan memperbaiki kondisi ekonominya, atau justru sebaliknya. Kondisi kedua juga dilihat dari bagaimana dengan bayi stunting, gizi buruk dan warga disabilitas yang tergolong miskin telah mendapatkan manfaat dari adanya zakat yang telah diberikan. Kegiatan monitoring ini dilakukan oleh perangkat desa yaitu bagian kesejahteraan masyarakat bersama lurah yang kemudian hasilnya akan dilaporkan kepada pihak kecamatan.

Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Partisipasi dalam inisiatif ini akan mendorong masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam semua proyek pembangunan di masa depan. Pemanfaatan hasil pembangunan sering diabaikan oleh pemerintah karena diasumsikan bahwa masyarakat akhirnya akan menemukan manfaatnya. Namun, masyarakat umum seringkali gagal mengenali manfaat dari program pembangunan tersebut, yang berarti hasil pembangunan kemungkinan akan menjadi tidak berarti. Sejalan dengan pelaksanaan program Kampung Madani jika dihitung secara kumulatif pada tahun 2022 BAZNAS telah menghimpun zakat sebanyak 14 miliar selama 7 bulan (surabaya.go.id). Dana tersebut yang akan dijadikan modal untuk membantu masyarakat mustahiq, baik dalam santunan berupa uang, barang maupun alat dagang sebagai modal usaha. Secara spesifik belum ada perhitungan kumulatif dari BAZNAS berapa zakat yang terhimpun selama pelaksanaan program berjalan, namun dengan data diatas bisa disimpulkan jika masyarakat muzakki secara sukarela untuk terus berpartisipasi dalam setiap program

pembangunan yang ada, karena mereka paham jika apa yang mereka berikan manfaatnya benar dirasakan oleh masyarakat mustahik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap "Partisipasi Masyarakat dalam Program Terobosan Baru Kampung Madani Sebagai Upaya Mengurangi Angka Kemiskinan di Kota Surabaya", maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Partisipasi masyarakat paling menonjol pada pelaksanaan kegiatan yaitu dimana kesukarelaan masyarakat dalam memberikan uangnya kepada masyarakat mustahiq dan pendistribusian langsung modal usaha berupa alat dagang kepada masyarakat agar mampu memperbaiki kondisi ekonominya. Serta partisipasi langsung lurah beserta perangkatnya yang terjun ke rumah warganya untuk menyalurkan bantuan yang telah dihimpun oleh BAZNAS untuk warga dengan kelainan fisik.
- 2. Partisipasi masyarakat sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan di Kota Surabaya sedikit banyak memberikan dampak positif ditunjukkan dengan kebermanfaatannya zakat yang diberikan mampu mengubah kondisi ekonomi mereka warga mustahiq dan dirasakan oleh warga lain yang membutuhkan.
- 3. Partisipasi masyarakat belum sampai pada tahap evaluasi program, sehingga belum ada umpan balik terhadap program berjalan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap "Partisipasi Masyarakat dalam Program Terobosan Baru Kampung Madani Sebagai Upaya Mengurangi Angka Kemiskinan di Kota Surabaya", penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

- Perlunya diadakan sosialisasi terkait apa itu Program Kampung Madani dan bagaimana cara kerja Program Kampung Madani, agar masyarakat semua mengetahui tujuan dan manfaat diadakannya program ini.
- Perlunya kejelasan lebih lanjut peran stakeholder yang lain selain peran BAZNAS dan LAZIS, sehingga untuk program selanjutnya lebih jelas bagaimana peran mereka dalam program tersebut.
- 3. Perlunya mengadakan evaluasi terhadap program ini, agar tau sejauh mana program berjalan memberikan output yang positif atau negatif kepada pelaksana program dan sasaran program.

DAFTAR PUSTAKA

- Elanda, Y., & Alie, A. (2023). Perempuan Dan Perangkap Kemiskinan Di Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 12(3), 518–529. Https://Doi.Org/10.23887/Jish.V12i3.67009
- Giani, M. N., Darmawan, A., & Hariyoko, Y. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Padat Karya Surabaya Dikecamatan Tenggilis Mejoyo. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(05).
- Hakim Abdul. (2023). Entaskan Kemiskinan, Kampung Madani dibentuk di Setiap Kelurahan di Surabaya. Jatim. antaranews. com. https://jatim.antaranews.com/berita/694095/entaskan-kemiskinan-kampung-madani-dibentuk-di-setiap-kelurahan-di-surabaya.
- Intan. (2023). Terobosan Baru Kampung Madani oleh Pemerintah Kota Surabaya. Disdukcapil. surabaya. go. id. https://disdukcapil.surabaya.go.id/2023/06/09/terobosan-baru-kampung-madani-oleh-pemerintah-kota-surabaya/.
- Kumparan. (2023). Kampung Madani di Setiap Kelurahan, Cara Walikota Surabaya Entaskan Kemiskinan. Kumparan. com. https://kumparan.com/kumparannews/kampung-madani-di-setiap-kelurahan-cara-wali-kota-surabaya-entaskan-kemiskinan-20D75dQIkAB.
- Pemkot Surabaya. (2022). Himpun Zakat hingga 14 M, Pemkot Surabaya dan BAZNAS Fokus Pengembangan SDM. Surabaya. go. id. https://surabaya.go.id/id/berita/66713/himpunzakat-hingga-14-m-pemko.
- Muhyar Nugraha, L. R. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.
- Permata, A. A. (2023). Konstruksi Masyarakat Surabaya Melalui Program Pnm Mekaar Dalam Membantu Mengentas Kemiskinan. *Prosiding Seminar Nasional*, 1631–1643.
- Riski Maunde, J. P. H. F. K. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud.
- Rizal Andreeyan. (2019). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam. *Administrasi Publik*, 2(4), 1938–1951.
- Rumak, D., Kediri, K., Lombok Barat, K., & Ma'arij, Z. (N.D.). *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Harapan*.
- Suryanto. (2023). Walikota Surabaya Eri Cahyadi Luncurkan 17 Kampung Madani dan 2 Kampung Pancasila. Radarsurabaya. com. read://https_radarsurabaya.jawapos.com/?url=https%3A%2F%2Fradarsurabaya.jawapos.com%2Fsurabaya%2F773341743%2Fwali-kota-surabaya-eri-cahyadi-luncurkan-17-kampung-madani-dan-2-kampung-pancasila
- Wirawan, R., & Nurpratiwi, R. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. 4(2), 301. Www.Publikasi.Unitri.Ac.Id
- Yulianto Kadji. (2020). Kemiskinan Dan Konsep Teoritisnya Oleh: Yulianto Kadji.